

PERKEMBANGAN SURAT KABAR *KEDAULATAN RAKYAT* DALAM PERPOLITIKAN MASA KEMERDEKAAN DI YOGYAKARTA TAHUN 1950-1967

Oleh: Fahmi Aji, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, ajifahmi23@gmail.com

Abstrak

Perkembangan pers selalu berjalan sejajar dengan perkembangan politik yang berada di Indonesia. Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang memiliki peran penting di Indonesia, salah satunya dalam bidang persuratkabaran. Munculnya surat kabar *Kedaulatan Rakyat* pasca kemerdekaan sedikit banyak telah memberikan pengaruh bagi kehidupan politik di Yogyakarta pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Kemunculan surat kabar *Kedaulatan Rakyat* pun menjadi hal penting karena surat kabar tersebut merupakan media yang pertama kali terbit di Yogyakarta pasca kemerdekaan guna membantu dalam penyebaran informasi mengenai kemerdekaan Indonesia. Pada periode 1950-1967, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* berkembang menjadi salah satu surat kabar revolusi yang tetap berusaha *independen* dalam pemberitaannya, meskipun keadaan pemerintahan di Indonesia pada waktu itu sedang mengalami pergolakan. Dalam keadaan tersebut, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* berperan penting sebagai perantara antara masyarakat dengan pemerintah dalam penyampaian aspirasi dan pendapat, selain sebagai sarana penyiaran dan penyebaran informasi. Berkat peran penting dan sikapnya yang tidak memihak tersebut, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* kemudian menjadi salah satu surat kabar yang dianggap penting bagi kehidupan masyarakat di Yogyakarta dan di Indonesia.

Kata kunci: *Kedaulatan Rakyat*, Surat kabar, Yogyakarta

THE DEVELOPMENT OF KEDAULATAN RAKYAT NEWSPAPER IN THE POLITICS OF INDEPENDENCE IN YOGYAKARTA IN 1950-1967

Abstract

The development of the press always runs parallel to the political developments residing in Indonesia. Yogyakarta is one of the areas that has an important role in Indonesia, one of them in the field of newspaper. The emergence of Kedaulatan Rakyat newspaper after independence has given a bit of influence to the political life especially in Yogyakarta and generally in Indonesia. The emergence of Kedaulatan Rakyat newspaper became an important thing because the newspaper is the first media published in Yogyakarta after independence to assist in the dissemination about Indonesia's independence. In the period 1950-1967, Kedaulatan Rakyat newspaper have evolved into one of the revolutionary newspapers that remain independent in its preaching, although the state of government in Indonesia at that time was experiencing upheaval. In those circumstances, Kedaulatan Rakyat Newspaper play an important role as an intermediary between the community and the government in delivery of aspirations and opinions, as well as a means of broadcasting and disseminating information. Thanks to its important role and impartiality, Kedaulatan Rakyat newspaper than became one of the newspapers considered important for the life of the people in Yogyakarta and Indonesia.

Key words: *Kedaulatan Rakyat*, Newspaper, Yogyakarta

Pendahuluan

Sejarah awal munculnya pers berupa surat kabar di Indonesia ditandai dengan masuknya mesin cetak ke Hindia Belanda pada tahun 1624. Masuknya mesin cetak inilah yang nantinya akan memunculkan surat kabar di Hindia Belanda. Mulai abad ke-18, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan surat kabar yang khusus diterbitkan untuk negara. Fungsi sebenarnya dari surat kabar yang dimunculkan oleh pemerintah Hindia Belanda yaitu untuk menyebarkan propaganda kekuasaan Hindia Belanda serta untuk menguatkan legitimasi pemerintah Hindia Belanda atas wilayah jajahannya. Pada awal abad ke-19, banyak bermunculan surat kabar di berbagai daerah yang bersifat komersil. Hal tersebut membuat pemerintah Hindia Belanda menjadi lebih berhati-hati, mereka pun melakukan tindakan preventif untuk mengendalikan surat kabar yang berada di berbagai daerah tersebut, termasuk di Yogyakarta.

Bagi wilayah Yogyakarta, surat kabar yang pertama muncul ialah surat kabar berbahasa Belanda, yaitu surat kabar *Mataram* tahun 1877, kemudian disusul oleh surat kabar berbahasa daerah (Jawa), yaitu surat kabar *Darmawarsita* tahun 1879.¹ Pada masa pergerakan nasional, pertumbuhan pers kaum pribumi semakin meningkat dengan pesat. Sekitar tahun 1925, muncul surat kabar berbahasa Jawa yang ditulis dengan huruf latin di Yogyakarta, yaitu surat kabar *Sedyo Tama*. Surat kabar *Sedyo Tama* inilah yang nantinya menjadi cikal bakal munculnya surat kabar *Kedaulatan Rakyat* pada masa kemerdekaan.²

Pada tahun 1942, setelah Sekutu dikalahkan oleh Jepang, surat kabar-surat kabar menjadi sukar didapatkan, termasuk di Yogyakarta. Hal ini dikarenakan surat kabar-surat kabar yang berbau Hindia Belanda banyak yang dilarang terbit. Bagi surat kabar *Sedyo Tama*, oleh pemerintah Jepang masih

diberikan izin terbit tetapi harus menggunakan bahasa Indonesia. Hal tersebut tidak berlangsung lama, pertengahan tahun 1942, penerbitan surat kabar *Sedyo Tama* akhirnya tutup karena pimpinan umumnya merasa bekerja di bawah tekanan. Kantor penerbitan surat kabar *Sedyo Tama* yang telah tutup, kemudian dirampas dan digunakan oleh pemerintah Jepang untuk menerbitkan surat kabar *Sinar Matahari* pada 1 Juli 1942.

Tujuan diterbitkannya surat kabar *Sinar Matahari* oleh pemerintah Jepang yaitu untuk mempropagandakan program-program politik mereka guna menghadapi perang Asia Timur Raya.³ Demi memperlancar programnya, pemerintah Jepang membentuk suatu departemen propaganda, yaitu *Sendenbu* (Barisan Propaganda Jepang). Dalam *Sendenbu* terdapat badan untuk menjaga ketertiban penerbitan surat kabar dan untuk mengawasi kegiatan penerbitan surat kabar di Jawa yang disebut dengan *Djawa Sinbun Kai*.⁴ Tahun 1945, ketika Jepang mulai mengalami kekalahan dalam perang Asia Timur Raya, surat kabar *Sinar Matahari* mulai mengalami ketidakstabilan. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh redaktur-redaktur Indonesia untuk memberikan informasi tentang keadaan yang sebenarnya terjadi di Indonesia.⁵

Puncaknya pada awal kemerdekaan Indonesia, kantor surat kabar *Sinar Matahari* mengalami vakum dan kemudian disegel oleh Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Yogyakarta.⁶ Pasca 40 hari kemerdekaan Indonesia tepatnya pada 27 September 1945, KNID Yogyakarta membuka kembali segel eks kantor penerbitan surat kabar *Sinar Matahari* tersebut. KNID Yogyakarta melakukannya guna menerbitkan surat kabar yang baru, yaitu

³*Ibid.*

⁴Edi Gunawan, *Djawa Sinbun Kai: Kehidupan Persurat Kabar Di Jawa Pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945, Skripsi*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 22.

⁵*Ibid.*

⁶Muhidin M. Dahlan, dkk, *Seabad Pers Kebangsaan; Bahasa Bangsa, Tanah Air Bahasa*, (Jakarta: I:Boekoe, 2007), hlm. 524.

¹Abdurrachman Soerjomihardjo, *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe; Sejarah sosial 1880-1930*, (Depok: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 176-184.

²Oka Kusumayudha, *Amanat Sejarah Dari Pekik Kemerdekaan Hingga Suara Hati Nurani Rakyat*, (Yogyakarta: PT BP Kedaulatan Rakyat, 1996), hlm. 27.

surat kabar *Kedaulatan Rakyat*.⁷ Pimpinan umum pertama surat kabar *Kedaulatan Rakyat* ialah Bramono dan pimpinan redaksinya ialah Soemantoro. Pada masa ini surat kabar *Kedaulatan Rakyat* berperan untuk memberitakan dan mempropagandakan kemerdekaan Indonesia.⁸

Ketika masa revolusi fisik, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* juga memiliki kedudukan yang penting, yaitu memberitakan tentang situasi, kondisi dan keadaan yang sedang terjadi di Indonesia, khususnya yang berada di Yogyakarta. Selain itu, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* juga memberitakan tentang keadaan yang sedang terjadi di mancanegara. Dampak dari kemunculan surat kabar *Kedaulatan Rakyat* sendiri sangat dirasakan masyarakat Yogyakarta, seperti mereka dapat mengikuti informasi terkini yang sedang terjadi di daerah maupun di nasional.⁹ Dalam pergolakan perang kemerdekaan, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* sempat mengalami kemunduran karena mundurnya pimpinan umum mereka yaitu Bramono. Pada masa yang sulit ini, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* dipimpin oleh pimpinan umum yang baru, yaitu Samawi. Samawi kemudian merekrut wartawan yang sudah berpengalaman yaitu Madikin Wonohito guna meningkatkan kembali eksistensi surat kabar *Kedaulatan Rakyat*.¹⁰

Pasca masa revolusi fisik, Indonesia mulai memasuki masa Demokrasi Liberal tahun 1950. Pada masa ini, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* tetap memegang teguh pendiriannya sebagai surat kabar revolusi, dalam arti tidak berpihak kepada suatu golongan, agama atau partai, sehingga surat kabar *Kedaulatan Rakyat* dituntut untuk tetap *independen* dalam menampung aspirasi. Hal

ini dikarenakan pada masa Demokrasi Liberal, pers sering digunakan sebagai alat dari suatu golongan tertentu untuk mendapatkan kedudukan di pemerintahan, maka dari itu surat kabar pada masa ini sering disebut sebagai pers liberal. Pers pada masa ini dianggap menjadi tidak *independen* karena mulai ditunggangi oleh kepentingan golongan tertentu, namun surat kabar *Kedaulatan Rakyat* tetap berusaha untuk menjadi surat kabar yang *independen*. Tahun 1955, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* berperan penting dalam memberitakan informasi paling *update* mengenai pemilu pertama, khususnya yang berada di Yogyakarta.¹¹

Pada 5 Juli 1959, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* juga tidak luput dalam pemberitaan tentang keputusan Presiden dalam Dekrit Presiden yang isinya mengenai kembalinya dasar negara Indonesia kepada UUD 1945 dan membubarkan Konstituante. Pasca dasar negara Indonesia kembali ke UUD 1945, Indonesia memasuki sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin atau masa Orde Lama.¹² Sejak masa Demokrasi Terpimpin, penerbitan surat kabar harus mempunyai Surat Izin Terbit (SIT), termasuk surat kabar *Kedaulatan Rakyat*. Kebijakan ini diterapkan oleh pemerintah guna mengontrol pers yang dianggap telah menyimpang. Selain itu, diterapkannya SIT berguna supaya penerbitan surat kabar mau mengikuti kebijakan Manipol USDEK (Manifesto Politik, UUD 1945, Sosialisme, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia).¹³ Surat kabar pada masa ini pun semakin banyak yang ditunggangi oleh kepentingan suatu golongan, sehingga semakin banyak surat kabar yang tidak *independen*.

Masa ini merupakan masa-masa sulit bagi surat kabar *Kedaulatan Rakyat* karena

⁷Surat kabar *Kedaulatan Rakyat*, "Dari Sinar Matahari Ke Kedaulatan Rakjat", 27 September 1965.

⁸*Ibid.*

⁹Surat kabar *Kedaulatan Rakyat*, "Berat Dan Moelia Tiada Taranja", 10 Nopember 1945.

¹⁰Taufik Rahzen, dkk, *Tanah Air Bahasa; Seratus Jejak Pers Indonesia*, (Jakarta: I:Boekoe, 2007), hlm. 174.

¹¹Surat kabar *Kedaulatan Rakyat*, "Daerah Istimewa Jogjakarta Terhindar Dari Bahaja Vacuum Demokrasi Dan Hukum", 16 Djuli 1955.

¹²Yukie H. Rushdie, *Setengah Abad Meniti Buih; Kedaulatan Rakyat Dalam Tajuk Rencana*, (Yogyakarta: Yayasan Kubus Pustakatama Yogyakarta, 1995), hlm. 67.

¹³*Ibid.*

pada masa ini penguasa dapat leluasa untuk mengendalikan suatu penerbitan surat kabar, sehingga surat kabar *Kedaulatan Rakyat* harus lebih berhati-hati dalam penerbitannya. Surat kabar *Kedaulatan Rakyat* juga harus memperhatikan ideologi-ideologi dari luar yang mengancamnya.¹⁴ Meskipun demikian, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* tetap berusaha untuk memberikan berita yang komprehensif dan *independen*. Ketika terjadi peristiwa G30S/PKI, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* juga muncul sebagai surat kabar yang berani memberikan informasi mengenai peristiwa G30S/PKI, padahal surat kabar yang lain masih enggan untuk memberitakan berita tersebut.¹⁵

Beberapa bulan pasca peristiwa tersebut, SIT dibubarkan dan pers pun kembali tidak terkontrol, namun hal tersebut tidak berlangsung berlarut-larut karena setelah banyak gejolak yang terjadi pada masa peralihan, pergantian sistem pemerintahan dari Orde Lama menjadi Orde Baru pun resmi diterapkan di Indonesia tahun 1967. Soeharto selaku presiden pengganti Soekarno pun kemudian meneruskan pembangunan Indonesia. Dalam hal ini, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* pun tak luput dalam memberitakan mengenai pergantian kepala negara Indonesia tersebut. Pada masa awal Orde Baru, seperti yang diberitakan dalam surat kabar *Kedaulatan Rakyat* edisi 6 Februari 1967, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan dalam bidang persuratkabaran. Hal ini dilakukan supaya keadaan yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin tidak terulang kembali, seperti pers yang terlalu dikekang oleh kebijakan yang diterapkan pada masa itu. Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk penertiban tersebut melalui Departemen Penerangan (Deppen) dengan maksud untuk mengarahkan surat kabar supaya berfungsi lebih tegas sebagai alat perjuangan dan alat revolusi. Penerapan dari kebijakan ini ialah semua penerbitan surat kabar harus ikut dalam suatu golongan tertentu atau langsung di bawah naungan Deppen tanpa terkecuali,

¹⁴Tanpa nama, *Garis Besar Perkembangan Pers Indonesia*, (Jakarta: Serikat Penerbit Surat Kabar, 1971), hlm. 128.

¹⁵*Ibid.*

termasuk surat kabar *Kedaulatan Rakyat*.¹⁶

Bagi penerbitan surat kabar *Kedaulatan Rakyat*, mengetahui bahwa semua penerbitan surat kabar harus mengikut pada suatu golongan tertentu membuatnya kurang setuju. Ini dikarenakan penerbitan surat kabar tersebut ingin tetap berdiri sendiri tanpa bergabung dengan suatu golongan tertentu dan tetap ingin berusaha menjadi surat kabar revolusi yang *independen*.¹⁷ Oleh karena itu, penerbitan surat kabar *Kedaulatan Rakyat* kemudian membuat siasat yaitu mengganti nama surat kabar tersebut. Hal ini dilakukan supaya penerbitan surat kabar tersebut dapat diterbitkan langsung di bawah naungan Deppen. Akhirnya pada tahun 1967, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* berganti nama menjadi *Dwikora* selama 59 hari, sebelum nantinya akan kembali lagi menjadi *Kedaulatan Rakyat*. Pada akhir tahun 1967, ketika keadaan pemerintahan di Indonesia mulai stabil, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* semakin berkembang dan semakin tegas dalam memberikan informasi yang komprehensif dan *independen*. Surat kabar *Kedaulatan Rakyat* juga tetap menjaga azas dasarnya sebagai surat kabar revolusi. Penerbitan surat kabar *Kedaulatan Rakyat* tetap menginformasikan berita-berita ter-*update* supaya tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Metode sejarah merupakan suatu proses untuk menguji dan mengkaji kebenaran rekaman sejarah dan peninggalan-peninggalan masa lampau dengan menganalisis secara kritis terhadap data yang ada sehingga menjadi penyajian dalam cerita yang dapat dipercaya.¹⁸ Metode sejarah juga dapat merekonstruksi sebanyak-banyaknya peristiwa masa lampau

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Octo Lampito, *Setengah Hati Sekokoh Nurani*, (Yogyakarta: PT BP Kedaulatan Rakyat, 2005), hlm. 55-56.

¹⁸Helius Sjamsuddin dan Ismaun, *Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Depdikbud, 1996), hlm. 61.

manusia.¹⁹ Penelitian ini menggunakan empat tahapan penelitian. Empat tahapan penelitian menurut Kuntowijoyo yang digunakan pada penelitian ini antara lain; pengumpulan data (Heuristik), kritik sumber (Verifikasi), penafsiran (Intepretasi), dan penulisan sejarah (Historiografi).²⁰

Heuristik merupakan tahap awal dalam melakukan penelitian sejarah, yaitu suatu kegiatan yang mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data atau materi sejarah. Tahap kedua kritik sumber adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber. Kritik sumber terbagi menjadi dua, yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Tahap ketiga interpretasi adalah penafsiran terhadap fakta-fakta yang sudah diperoleh melalui tahap kritik sumber. Melalui tahap interpretasi kemampuan intelektual sejarawan benar-benar diuji dikarenakan tahapan ini sering dijadikan pemicu subjektifitas. Tahap terakhir historiografi merupakan proses menceritakan rangkaian fakta dalam sebuah bentuk tulisan yang bersifat historis, ditulis dengan kronologis berdasarkan hasil yang didapat peneliti setelah melewati tahap heuristik, kritik sumber dan interpretasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Munculnya Surat Kabar Di Yogyakarta

Munculnya pers berupa surat kabar di Indonesia berjalan beriringan dengan ekspansi bertahap Bangsa Belanda.²¹ Dalam perkembangannya, pers di Hindia Belanda dibagi menjadi tiga babak. Babak pertama yaitu tahun 1744-1854, dibabak pertama ini Bangsa Belanda dan orang-orang Eropa masih

mendominasi dunia pers di Hindia Belanda. Babak kedua yaitu tahun 1854-1907, pada babak ini kaum pribumi mulai terlibat dalam dunia pers. Terakhir pada babak yang ketiga yaitu tahun 1907-1945, pers semakin berkembang sebagai alat politik kaum pribumi dalam mempropagandakan nasionalisme dan semangat kebangsaan.²²

Pada periode awal, surat kabar yang muncul di Hindia Belanda dimulai pada masa VOC. Berawal dari para *zending*²³ yang memperkenalkan mesin cetak ke Hindia Belanda tahun 1624. Fungsi sebenarnya mesin cetak yang dibawa oleh para *zending* ini adalah untuk mencetak kitab-kitab guna penyebaran agama, namun kenyataannya mesin cetak ini tidak berguna karena tidak adanya tenaga terampil dan ahli. Baru pada abad ke-18, tepatnya tahun 1744 mesin cetak mulai digunakan kembali karena telah mulai muncul tenaga terampil dan ahli di Hindia Belanda. Mesin cetak ini kemudian digunakan untuk menerbitkan surat kabar pertama yang khusus diterbitkan untuk negara dan untuk sebagian kecil orang-orang Eropa, yaitu surat kabar *Bataviase Nouvelles*.

Pada abad ke-19 tepatnya tahun 1811, Hindia Belanda direbut dan diduduki oleh pemerintah Inggris. Pada masa pendudukan Inggris ini, penerbitan surat kabar *Bataviasche Koloniale Courant* diganti menjadi surat kabar *Java Government Gazette* yang terbit tahun 1812. Pasca 5 tahun Inggris menduduki Hindia Belanda, tahun 1816 pemerintah Hindia Belanda kembali menguasai Hindia Belanda.²⁴

²²Mega Puspita Prinandani, *Perkembangan Surat Kabar Retnodhoemilah Pada Masa Kepemimpinan Wahidin Soedirohoesodo (1901-1906)*, *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2015), hlm. 31.

²³Menurut Kamus Bahasa Indonesia, *zending* merupakan badan-badan penyelenggara (misi) penyebaran agama Kristen. Lihat Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, 2008), hlm. 1632.

²⁴Ahmat Adam, *op. cit.*, hlm. 2-8.

¹⁹Nugroho Notosusanto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah* (Jakarta: Mega Book Store, 1984), hlm. 22-23.

²⁰Abd Rahman Wahid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 43.

²¹Ahmat Adam, *Sejarah Awal Pers Dan Kesadaran Keindonesiaan*, (Jakarta: Hasta Mitra, 2003), hlm. 1.

Sekitar tahun 1825, mulai muncul surat kabar yang dikelola oleh swasta dan berorientasi komersial di Hindia Belanda, salah satunya ialah surat kabar *Bataviaasch Advertentieblad*. Munculnya penerbitan swasta membuat pemerintah Hindia Belanda menjadi bersifat preventif. Sifat preventif ini diterapkan dalam suatu tindakan berupa pemeriksaan surat kabar sebelum disetujui untuk diterbitkan. Tindakan tersebut kemudian memunculkan istilah “pers resmi” dan “pers tidak resmi” di Hindia Belanda.²⁵

Banyaknya surat kabar berbahasa Belanda yang muncul, baik yang diterbitkan oleh negara maupun oleh swasta membuat perkembangan surat kabar di Hindia Belanda pun semakin pesat. Tahun 1854, pers mulai masuk pada babak kedua, dimana pada awal babak kedua ini pemerintah Hindia Belanda mulai merancang Undang-Undang Pers yang berguna untuk menekan laju suatu surat kabar yang dapat membahayakan posisi mereka di Hindia Belanda. UU Pers yang resmi digunakan di Hindia Belanda baru selesai dibuat tahun 1856 dan dinamakan UU Pers 1856. Sebelum itu, ketika pertengahan tahun-tahun pembuatan UU Pers 1856, kaum pribumi berhasil menerbitkan surat kabar berbahasa daerah (Jawa) yang pertama di Hindia Belanda. Surat kabar tersebut bernama surat kabar *Bromartani*.²⁶

Bangsa Tionghoa di Hindia Belanda tidak mau ketinggalan dalam perkembangan zaman ini. Akhirnya pada paruh kedua abad ke-19, penerbitan surat kabar Tionghoa mulai muncul. Tahun 1886, seorang Tionghoa yang bernama Tjoa Tjoan Lok membeli dan mengambil alih percetakan yang menerbitkan surat kabar *Bintang Timoer*. Pengambilalihan salah satu penerbitan terlaris tersebut merupakan awal dari orang-orang Tionghoa dalam dunia penerbitan. Tahun 1900, orang-orang Tionghoa yang berpendidikan di Batavia, mulai mendirikan perhimpunan Tjong Hoa Hwe Koan (THHK). Perhimpunan ini berhasil menerbitkan surat kabar bagi kebutuhan orang-orang Tionghoa itu sendiri,

²⁵Abdurrachman Soejomihardjo, *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe; Sejarah Sosial 1880-1930*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 176.

²⁶Ahmat Adam, *op. cit.*, hlm. 27-35.

surat kabar tersebut berbahasa Melayu dan bernama surat kabar *Li Po*.²⁷

Pers berkembang dengan lambat di kalangan pribumi. Hal ini dikarenakan pada tahun-tahun sebelum abad ke-20, surat kabar yang murni terbitan kaum pribumi dapat dikatakan belum ada, meskipun telah muncul surat kabar berbahasa Melayu dan berbahasa Jawa serta sudah adanya redaktur dari kaum pribumi. Awal abad ke-20 bisa dikatakan telah memasuki babak ketiga.²⁸ Pada masa ini pers kemudian menjadi bagian penting dalam perjuangan kaum pribumi, di pelopori oleh Raden Mas Tirta Adhi Soerjo yang mendirikan penerbitan surat kabar *Soenda Berita* dan surat kabar *Medan Prijaji*. Hal tersebut kemudian terus berkembang dengan pesat di Hindia Belanda.²⁹

Bagi wilayah Yogyakarta, sejarah perkembangan surat kabar diawali dengan munculnya surat kabar berbahasa Belanda, yaitu surat kabar *Mataram* tahun 1877. Berselang dua tahun muncullah surat kabar berbahasa Jawa yang pertama di Yogyakarta, yaitu surat kabar *Darmawarsita* tahun 1879 dan disusul oleh surat kabar *Retnodhoemilah* tahun 1895. Dalam perkembangannya, surat kabar di Yogyakarta semakin banyak bermunculan, apalagi setelah diterapkannya kebijakan politik etis. Salah satu surat kabar yang muncul pasca diterapkannya politik etis ialah surat kabar *Sedyo Tama*. Surat kabar *Sedyo Tama* merupakan surat kabar yang didirikan oleh pra pemuda Yogyakarta yang tidak terikat dengan organisasi manapun. Hingga masa pendudukan Jepang tahun 1942, surat kabar yang mampu bertahan di Yogyakarta ialah surat kabar *Mataram*, surat kabar *Djogja Bode*, surat kabar *Kawoela*, dan surat kabar *Sedyo Tama*.³⁰ Selain surat kabar tersebut, semua surat kabar telah tutup karena

²⁷Mirjam Maters, *Dari Perintah Halus Ke Tindakan Keras*, (Jakarta: Hasta Mitra, 2003), hlm. 43-46.

²⁸Pramoedya Ananta Toer, *Sang Pemula*, (Jakarta: Hasta Mitra, 1985), hlm. 42-43.

²⁹Takashi Siraisi, *Zaman Bergerak*, (Jakarta: Grafiti, 1997), hlm. 46.

³⁰Abdurrachman Soejomihardjo, *op. cit.*, hlm. 192-194.

dipengaruhi oleh berbagai faktor.

B. Keberadaan Surat Kabar *Kedaulatan Rakyat* Di Yogyakarta

Surat kabar *Kedaulatan Rakyat* merupakan salah satu surat kabar tertua yang ada di Indonesia. Munculnya surat kabar *Kedaulatan Rakyat* tidak dapat terlepas dari pengaruh Bangsa kolonial Belanda. Hal ini terbukti pada masa kolonial Belanda sekitar tahun 1925 muncul surat kabar *Sedyo Tama* yang nantinya akan menjadi cikal bakal berdirinya surat kabar *Kedaulatan Rakyat* pada masa kemerdekaan Indonesia.³¹ Tahun 1942, Jepang mengambil alih kekuasaan atas Hindia Belanda dan Jepang pun berhasil menduduki Hindia Belanda.³² Pada 1 Juli 1942, Pemerintah Jepang pun kemudian merampas kantor eks penerbitan surat kabar *Sedyo Tama* tersebut dan dijadikan sebagai kantor penerbitan surat kabar Jepang yang digunakan untuk menerbitkan surat kabarnya sendiri. Surat kabar yang diterbitkan pemerintah Jepang di Yogyakarta sebagai pengganti surat kabar *Sedyo Tama* ini bernama surat kabar *Sinar Matahari*.³³

Surat kabar *Sinar Matahari* menjadi satu-satunya surat kabar yang terbit di Yogyakarta pada masa pemerintahan Jepang. Tahun 1945, ketika kota Hiroshima dan Nagasaki di bom oleh Sekutu pemerintahan Jepang di Indonesia mulai goyah, termasuk yang berada di Yogyakarta. Ketika Jepang benar-benar telah menyerah kepada Sekutu, Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Yogyakarta dibantu oleh para pemuda Yogyakarta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyegel kantor penerbitan surat kabar *Sinar Matahari* tersebut. Ketika Indonesia telah memproklamasikan

kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia mulai bisa mendapatkan informasi kembali. 40 hari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tepatnya pada 27 September 1945, eks kantor penerbitan surat kabar *Sinar Matahari* di Yogyakarta yang sebelumnya disegel pun akhirnya mulai dibuka kembali dan kemudian menerbitkan surat kabar yang baru, yaitu surat kabar *Kedaulatan Rakyat*.³⁴

Pasca Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Belanda tidak mengakui kemerdekaan tersebut dan kemudian Bangsa Belanda ingin kembali menguasai Indonesia dengan menunggangi NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*), Indonesia pun kemudian mulai memasuki masa revolusi fisik. Dalam masa revolusi fisik, pers Indonesia terbagi menjadi dua golongan, yaitu pers yang terbit di daerah pendudukan Sekutu dan pers yang terbit di daerah kekuasaan Indonesia, keduanya disebut pers Republikan yang menjadi lawan dari pers NICA.³⁵ Pada masa revolusi fisik ini, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* memiliki kedudukan yang penting, yaitu memberitakan tentang situasi, kondisi dan keadaan yang sedang terjadi di Indonesia, khususnya di Yogyakarta.

Pada awal kemerdekaan Indonesia ini, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* ikut membantu dalam penyebaran berita mengenai proklamasi kemerdekaan menggunakan selebaran kilat.³⁶ Pada masa revolusi fisik ini, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* memiliki kedudukan yang penting, yaitu memberitakan tentang situasi, kondisi dan keadaan yang sedang terjadi di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Berita yang tersedia di surat kabar *Kedaulatan Rakyat* yaitu mengenai keadaan politik sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Selain berita dalam negeri, surat kabar tersebut juga memberitakan mengenai situasi yang sedang

³¹Oka Kusumayudha, *Amanat Sejarah Dari Pekik Kemerdekaan Hingga Suara Hati Nurani Rakyat*, (Yogyakarta: PT BP Kedaulatan Rakyat, 1996), hlm. 7-8.

³²*Ibid.*

³³Edi Gunawan, *Djawa Sinbun Kai: Kehidupan Persurat Kabar Di Jawa Pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945, Skripsi*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 22.

³⁴Oka Kusumayudha, *op. cit.*, hlm. 11-12.

³⁵Octo Lampito, *Setengah Hati Sekokoh Nurani*, (Yogyakarta: PT BP Kedaulatan Rakyat, 2005), hlm. 17.

³⁶Selebaran Siaran Kilat *Kedaulatan Rakyat*, "Semangat Rakjat Tak Dapat Dipatahkan", 25 Nopember 1945.

terjadi di luar negeri.³⁷

Tahun 1947, di tengah-tengah perkembangannya surat kabar *Kedaulatan Rakyat* mengalami pukulan keras karena pimpinan redaksinya, yaitu Soemantoro ditangkap oleh Belanda karena dianggap membahayakan dengan kritiknya yang tajam. Hal ini kemudian membuat surat kabar *Kedaulatan Rakyat* sempat mengalami penurunan. Ketika dalam masa sulit tersebut, ditunjuklah pimpinan redaksi yang baru untuk menggantikan Soemantoro, yaitu Samawi. Samawi kemudian menggaet seorang redaktur yang telah berpengalaman untuk bergabung di penerbitan surat kabar *Kedaulatan Rakyat*, redaktur tersebut ialah Madikin Wonohito.³⁸ Bergabungnya Madikin Wonohito membuat penerbitan surat kabar *Kedaulatan Rakyat* kembali menemukan rasa kepercayaan dirinya kembali.

Surat kabar *Kedaulatan Rakyat* tetap memberitakan mengenai keadaan yang sedang terjadi di Indonesia, seperti perundingan-perundingan dan perjanjian-perjanjian yang akan dilakukan oleh pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Selain itu, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* juga tetap memberikan kritikan-kritikan untuk Belanda, meskipun lebih berhati-hati supaya tidak terjadi penangkapan kembali.³⁹ Kegiatan seperti di atas terus diberitakan oleh Surat kabar *Kedaulatan Rakyat* hingga memasuki sistem pemerintahan baru.⁴⁰

Indonesia memasuki sistem pemerintahan baru pada tahun 1950, sistem pemerintahan baru ini dinamakan sistem pemerintahan Demokrasi Liberal. Pers pada

³⁷Surat kabar *Kedaulatan Rakyat*, "Berat Dan Moelia Tiada Taranja", 10 Nopember 1945.

³⁸Muhidin M. Dahlan, dkk, *Seabad Pers Kebangsaan; Bahasa Bangsa, Tanah Air Bahasa*, (Jakarta: I:Boekoe, 2007), hlm. 525.

³⁹Yukie H. Rushdie, *Setengah Abad Meniti Buih: Kedaulatan Rakyat Dan Tajuk Rencana*, (Yogyakarta: Yayasan Kubus Pustakatama Yogyakarta, 1995), hlm. 39.

⁴⁰*Ibid.*

masa Demokrasi Liberal ini sering disebut sebagai pers liberal karena pada masa ini sangat menjunjung tinggi kebebasan pers, namun seiring perkembangannya mulai banyak pers yang terlampaui bebas hingga meninggalkan norma ketimurannya. Selain itu, pers pada masa ini juga mulai ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan dari suatu golongan tertentu. Pada sistem pemerintahan ini, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* mulai diincar oleh golongan-golongan tertentu supaya dalam pemberitaannya lebih condong atau pro kepada kepentingan suatu golongan tersebut. Walaupun demikian penerbitan surat kabar *Kedaulatan Rakyat* tetap berusaha untuk mempertahankan *keindependennya* dalam memberikan suatu informasi. Penerbitan surat kabar *Kedaulatan Rakyat* dengan tegas menyatakan bahwa penerbitan tersebut adalah penerbitan yang tidak akan ditunggangi oleh golongan apapun dan akan berusaha untuk tetap *independen*.⁴¹

Pada 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekret yang isinya mengembalikan dasar negara Indonesia dari UUDS 1950 menjadi UUD 1945 dan membubarkan Konstituante. Kembali dipergunakannya UUD 1945 membawa Indonesia memasuki periode baru dalam sistem pemerintahannya, yaitu sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin atau masa Orde Lama.⁴² Pada sistem pemerintahan ini semua surat kabar yang terbit di Indonesia harus memiliki Surat Izin Terbit (SIT). Kebijakan ini diberlakukan supaya tidak terulang kembali bentuk pers yang terlalu liberal, kebijakan ini merupakan kebijakan lanjutan dari SOB. Selain itu, fungsi dari Surat Izin Terbit juga untuk mendukung kebijakan Manipol USDEK.⁴³

Keadaan politik yang semakin memprihatinkan membuat surat kabar

⁴¹Octo Lampito, *Setengah Hati Sekokoh Nurani*, (Yogyakarta: PT BP Kedaulatan Rakyat, 2005), hlm. 21.

⁴²*Ibid.*

⁴³Abdurachman Soerjomihardjo, *Beberapa Segi Perkembangan Pers Di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2002), hlm. 186-187.

Kedaulatan Rakyat semakin berhati-hati dalam memberikan informasi supaya penerbitannya tidak diberedel oleh pemerintah. Meskipun demikian, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* tetap komprehensif dalam penyampaian beritanya, sehingga tetap dapat diterima dan dinikmati oleh khalayak umum. Surat kabar *Kedaulatan Rakyat* menggunakan gaya bahasa khas dalam menerbitkan surat kabarnya. Tahun 1965, ketika terjadi peristiwa G30S/PKI sangat sedikit surat kabar yang menerbitkan berita mengenai peristiwa tersebut. Hal ini dikarenakan keadaan masih tidak stabil dan penerbitan surat kabar pun harus lebih berhati-hati dalam memberikan informasi supaya tidak menimbulkan kontroversi dalam pemberitaannya. Ketika masa-masa kontroversial ini, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* tetap terbit dan memberitakan peristiwa yang sedang terjadi pada waktu itu. Bahkan selama 7 hari berturut-turut pasca peristiwa tersebut, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* selalu terbit untuk memberikan informasi mengenai keadaan pasca terjadinya peristiwa G30S/PKI ini.⁴⁴

Padahal pada 2 Oktober 1965, penerbitan surat kabar *Kedaulatan Rakyat* telah dianjurkan supaya tidak menerbitkan surat kabarnya terlebih dahulu demi keamanan dan kestabilan, namun saran tersebut tidak diindahkan oleh penerbitan surat kabar tersebut, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* pun tetap terbit. Surat kabar ini pun juga tetap berusaha *independen* untuk menjaga keadaan supaya tetap stabil. Berkat keteguhan mereka untuk tetap menerbitkan surat kabar tersebut, akhirnya penerbitan surat kabar ini pun mendapatkan dorongan serta dukungan dari masyarakat Yogyakarta dan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Hal tersebut membuat penerbitan surat kabar *Kedaulatan Rakyat* menjadi salah satu surat kabar yang tetap teguh dalam pendiriannya dalam mempertahankan *keindependennya*. Surat kabar *Kedaulatan Rakyat* selalu memberitakan mengenai penumpasan G30S/PKI di dalam rubriknya hingga bulan Desember 1965, akibatnya surat kabar tersebut semakin laris diburu oleh masyarakat Yogyakarta dan Indonesia.

Selain itu, ada beberapa faktor yang membuat surat kabar *Kedaulatan Rakyat* laris, seperti media yang bisa digunakan untuk

penyebaran informasi sekitar tahun 1965 memang masih terbatas pada surat kabar dan radio. Pada sisi lain, surat kabar lainnya memang belum banyak mengetahui mengenai kebenaran peristiwa G30S/PKI, sehingga belum berani menerbitkan beritanya. Adapula pengaruh dari keadaan yang masih tidak stabil, mengakibatkan hanya surat kabar yang berani nekat yang menerbitkan berita tersebut, seperti surat kabar *Kedaulatan Rakyat*. Alasan surat kabar *Kedaulatan Rakyat* berani menerbitkan berita mengenai peristiwa G30S/PKI karena surat kabar tersebut merupakan surat kabar yang *independen*, jadi tetap bisa bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat dan informasi bagi khalayak umum.⁴⁵

Beberapa bulan pasca peristiwa tersebut, SIT dibubarkan dan pers pun kembali tidak terkontrol, namun hal tersebut tidak berlangsung berlarut-larut karena setelah banyak gejolak yang terjadi pada masa peralihan, pergantian sistem pemerintahan dari Orde Lama menjadi Orde Baru pun resmi diterapkan di Indonesia tahun 1967. Soeharto selaku presiden pengganti Soekarno pun kemudian meneruskan pembangunan Indonesia. Dalam hal ini, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* pun tak luput dalam memberitakan mengenai pergantian kepala negara Indonesia tersebut. Pada masa awal Orde Baru, seperti yang diberitakan dalam surat kabar *Kedaulatan Rakyat* edisi 6 Februari 1967, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan dalam bidang persuratkabaran. Hal ini dilakukan supaya keadaan yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin tidak terulang kembali, seperti pers yang terlalu dikekang oleh kebijakan yang diterapkan pada masa itu. Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk penertiban tersebut melalui Departemen Penerangan (Deppen) dengan maksud untuk mengarahkan surat kabar supaya berfungsi lebih tegas sebagai alat perjuangan dan alat revolusi. Penerapan dari kebijakan ini ialah semua penerbitan surat kabar harus ikut dalam suatu golongan tertentu atau langsung di bawah naungan Deppen tanpa terkecuali,

⁴⁴Octo Lampito, *op. cit.*, hlm. 48-51.

⁴⁵Oka Kusumayudha, *Amanat Sejarah Dari Pekik Kemerdekaan Hingga Suara Hati Nurani Rakyat*, (Yogyakarta: PT BP Kedaulatan Rakyat, 1996), hlm. 51-54.

termasuk surat kabar *Kedaulatan Rakyat*.⁴⁶

Bagi penerbitan surat kabar *Kedaulatan Rakyat*, mengetahui bahwa semua penerbitan surat kabar harus mengikut pada suatu golongan tertentu membuatnya kurang setuju. Ini dikarenakan penerbitan surat kabar tersebut ingin tetap berdiri sendiri tanpa bergabung dengan suatu golongan tertentu dan tetap ingin berusaha menjadi surat kabar revolusi yang *independen*.⁴⁷ Oleh karena itu, penerbitan surat kabar *Kedaulatan Rakyat* kemudian membuat siasat yaitu mengganti nama surat kabar tersebut. Hal ini dilakukan supaya penerbitan surat kabar tersebut dapat diterbitkan langsung di bawah naungan Deppen. Akhirnya pada tahun 1967, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* berganti nama menjadi *Dwikora* selama 59 hari, sebelum nantinya akan kembali lagi menjadi *Kedaulatan Rakyat*. Pada akhir tahun 1967, ketika keadaan pemerintahan di Indonesia mulai stabil, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* semakin berkembang dan semakin tegas dalam memberikan informasi yang komprehensif dan *independen*. Surat kabar *Kedaulatan Rakyat* juga tetap menjaga azas dasarnya sebagai surat kabar revolusi. Penerbitan surat kabar *Kedaulatan Rakyat* tetap menginformasikan berita-berita *ter-update* supaya tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Yogyakarta.

C. Pengaruh Surat Kabar *Kedaulatan Rakyat* Di Yogyakarta

Surat kabar *Kedaulatan Rakyat* merupakan salah satu media yang turut serta dalam menyumbangkan karya-karya tertulisnya sebagai wujud pengabdian bangsa yang peduli terhadap perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagai suatu media, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* memiliki berbagai macam cara untuk dapat menyampaikan tujuan dari karya-karya yang telah dituliskan. Berbagai upaya dilakukan untuk mengemas surat kabar *Kedaulatan Rakyat* supaya menjadi media

yang dapat diterima oleh masyarakat.⁴⁸ Dalam politik redaksi surat kabar *Kedaulatan Rakyat*, upaya-upaya dilakukan baik secara fisik maupun rubrikasi.

Surat kabar *Kedaulatan Rakyat* berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya yang berada di Yogyakarta. Surat kabar *Kedaulatan Rakyat* ketika pertama kali terbit langsung berperan untuk memberitakan mengenai kemerdekaan Indonesia di wilayah Yogyakarta. Bahkan pada masa revolusi fisik, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* sempat menerbitkan selebaran kilat yang berperan dalam memberikan informasi mengenai situasi, kondisi dan keadaan di Yogyakarta pada waktu itu.⁴⁹ Surat kabar *Kedaulatan Rakyat* dalam pemberitaannya selalu memberikan semangat juang sehingga berdampak dalam membangkitkan dan mengobarkan semangat revolusi masyarakat Yogyakarta supaya tetap berusaha untuk berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.⁵⁰

Pada sistem pemerintahan Demokrasi Liberal, peran dan fungsi surat kabar *Kedaulatan Rakyat* semakin matang dalam membawa semangat revolusi, meskipun pada sistem pemerintahan ini banyak muncul permasalahan dalam bidang persuratkabaran di Indonesia. Permasalahan tersebut seperti penyalahgunaan kebebasan pers dan penerbitan surat kabar di Indonesia mulai ditanggapi oleh kepentingan suatu golongan tertentu sehingga penerbitan surat kabar mulai tidak *independen*.⁵¹ Pada masa ini surat kabar *Kedaulatan Rakyat* muncul sebagai surat kabar yang memiliki peran penting di Yogyakarta,

⁴⁸Mega Puspita Prinandani, *Perkembangan Surat Kabar Retnodhoemilah Pada Masa Kepemimpinan Wahidin Soedirohoesodo (1901-1906)*, *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2011), hlm. 75.

⁴⁹Mohammad Idham Samawi, wawancara di Yogyakarta, 26 Mei 2018.

⁵⁰Octo Lampito, wawancara di Yogyakarta, 4 Mei 2018.

⁵¹Mohammad Idham Samawi, wawancara di Yogyakarta, 26 Mei 2018.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Octo Lampito, *Setengah Hati Sekokoh Nurani*, (Yogyakarta: PT BP Kedaulatan Rakyat, 2005), hlm. 55-56.

Peran dari surat kabar *Kedaulatan Rakyat* salah satunya ialah memberikan informasi yang tetap *independen* untuk masyarakat Yogyakarta, meskipun pada masa ini surat kabar *Kedaulatan Rakyat* juga mulai digerogoti oleh ideologi dari golongan tertentu. Berkat keteguhannya, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* tetap dapat mempertahankan *keindependennya*.⁵² Pada sistem pemerintahan ini, dampak yang diberikan oleh surat kabar *Kedaulatan Rakyat* kepada masyarakat Yogyakarta ialah masyarakat tetap bisa membaca berita yang memang seharusnya dapat diketahui oleh publik, bukan berita yang hanya condong kepada golongan tertentu.⁵³

Dalam sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin, pemerintah mewajibkan setiap penerbitan surat kabar memiliki Surat Izin Terbit (SIT). Hal ini diterapkan supaya pemerintah dapat mengendalikan penerbitan surat kabar.⁵⁴ Pada masa ini, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* tetap menjaga eksistensinya dalam mengiringi semangat revolusi, meskipun seluruh penerbitan surat kabar di Indonesia dalam kendali pemerintah. Peran penting surat kabar *Kedaulatan Rakyat* pada sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin ini mulai tampak ketika terjadi peristiwa G30S/PKI. Surat kabar *Kedaulatan Rakyat* berperan dalam memberikan informasi yang komprehensif mengenai peristiwa tersebut. Hal ini dikarenakan pasca peristiwa tersebut, sedikit sekali surat kabar yang berani memberitakan mengenai peristiwa tersebut. Hal ini berdampak kepada masyarakat Yogyakarta, yaitu masyarakat Yogyakarta menjadi mengetahui informasi mengenai peristiwa tersebut.

Pasca peristiwa tersebut, ketika masa transisi sekitar tahun 1966-1967, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* berperan aktif dalam

menyampaikan aspirasi masyarakat. Kali ini aspirasi mengenai pro kontra antara masyarakat yang ingin mempertahankan Orde Lama dengan masyarakat yang menginginkan adanya perubahan sistem pemerintahan.⁵⁵ Dalam hal inilah surat kabar *Kedaulatan Rakyat* ikut serta dalam membantu menampung dan menyalurkan aspirasi mengenai pro kontra masyarakat Yogyakarta ketika menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah mengenai hal mempertahankan sistem pemerintahan yang lama atau merombak sistem pemerintahan yang sudah tidak efektif menjadi sistem pemerintahan yang baru.⁵⁶ Akhirnya sistem pemerintahan berubah dari Orde Lama ke Orde Baru tahun 1967. Meskipun demikian, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* tetap berusaha menjadi surat kabar yang dipercaya oleh masyarakat Yogyakarta.

Kesimpulan

Surat kabar *Kedaulatan Rakyat* merupakan salah satu surat kabar yang mempunyai pengaruh penting di Yogyakarta bahkan di Indonesia. Pasca masa revolusi fisik, Indonesia memasuki sistem pemerintahan baru. Indonesia menerapkan sistem pemerintahan Demokrasi Liberal tahun 1950. Bagi wilayah Yogyakarta, awal diterapkannya sistem pemerintahan tersebut memunculkan asa bagi kehidupan surat kabar, termasuk surat kabar *Kedaulatan Rakyat*. Hal ini disebabkan pada masa Demokrasi Liberal kebebasan pers sangat di kedepankan. Dalam perkembangannya, surat kabar di Indonesia termasuk yang berada di Yogyakarta mulai banyak mengalami benturan dengan ideologi dari luar karena pers telah terlampaui bebas. Ini mengakibatkan keadaan surat kabar yang berada di Yogyakarta pun mulai tidak *independen* dalam pemberitaannya. Berbeda dengan surat kabar lain yang mulai tidak *independen*, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* muncul sebagai surat kabar yang tetap berusaha untuk menjadi surat kabar revolusi dan tetap *independen* dalam pemberitaannya.

⁵²Mohammad Idham Samawi, wawancara di Yogyakarta, 26 Mei 2018.

⁵³Primaswolo Sudjono, wawancara di Yogyakarta, 11 Mei 2018.

⁵⁴Oka Kusumayudha, *Amanat Sejarah Dari Pekik Kemerdekaan Hingga Suara Hati Nurani Rakyat*, (Yogyakarta: PT BP Kedaulatan Rakyat, 1996), hlm. 48.

⁵⁵Yukie H. Rushdie, *Setengah Abad Meniti Buih; Kedaulatan Rakyat Dalam Tajuk Rencana*, (Yogyakarta: Yayasan Kubus Pustakatama, 1995), hlm. 127.

⁵⁶*Ibid.*

Pada 5 Juli 1959, sistem pemerintahan di Indonesia pun berganti menjadi sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin atau Orde Lama. Dalam sistem pemerintahan ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan Surat Izin Terbit (SIT). Kebijakan ini diterapkan supaya surat kabar di Indonesia tetap terkendali dan mau mengikuti kebijakan Manipol USDEK. Pada masa ini, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* sedikit mengalami kendala dalam pemberitaannya di Yogyakarta, sebab pada masa ini surat kabar tidak sebebas seperti pada masa sebelumnya. Surat kabar *Kedaulatan Rakyat* pun ketika menerbitkan beritanya menjadi lebih berhati-hati, sebab bila menerbitkan berita yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah maka akan diberedel.

Ketika terjadi peristiwa G30S/PKI, keadaan di Indonesia menjadi tidak stabil, surat kabar yang berada di Yogyakarta pun tidak ada yang berani terbit. Hal ini disebabkan surat kabar di Yogyakarta belum mengetahui peristiwa yang sebenarnya terjadi, disisi lain banyak surat kabar yang sudah tidak *independen*. Dalam hal ini, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* muncul sebagai surat kabar yang berani terbit, sehingga masyarakat Yogyakarta tetap mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang sedang terjadi. Ketika terjadi masa transisi, keadaan surat kabar di Yogyakarta masih belum stabil, namun surat kabar *Kedaulatan Rakyat* tetap berusaha untuk tetap menjaga eksistensinya dalam memberikan informasi yang sekomprehensif mungkin kepada masyarakat Yogyakarta.

Pada masa Demokrasi Liberal, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* merupakan salah satu surat kabar yang dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat Yogyakarta. Hal ini terbukti ketika mulai banyak surat kabar lain yang tidak *independen*, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* tampil sebagai surat kabar yang tetap dipercaya oleh masyarakat Yogyakarta sebab dalam pemberitaannya selalu menampilkan informasi yang komprehensif dan tidak memihak. Memasuki masa Demokrasi Terpimpin, pengaruh surat kabar *Kedaulatan Rakyat* sedikit berkurang. Ini disebabkan adanya Surat Izin Terbit (SIT) yang membatasi pers. Walaupun demikian, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* tetap berusaha memberikan berita yang komprehensif dengan gaya bahasanya yang khas.

Saat terjadi peristiwa G30S/PKI, surat

kabar *Kedaulatan Rakyat* memberikan pengaruh yang signifikan, sebab informasi yang diberikan sangat membantu masyarakat Yogyakarta supaya tetap dapat mengikuti kejadian yang sedang terjadi. Ketika dalam masa transisi, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* menjadi salah satu surat kabar yang berpengaruh dalam penyampaian aspirasi masyarakat. Memasuki masa Orde Baru, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* sempat berganti nama menjadi "*Dwikora*". Meskipun berganti nama, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* tetap memberikan informasi yang aktual bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat Yogyakarta.

Surat kabar *Kedaulatan Rakyat* merupakan surat kabar yang tetap menjaga visinya sebagai surat kabar revolusi. Selain itu, surat kabar *Kedaulatan Rakyat* dari masa ke masa juga tetap berusaha menjadi surat kabar yang *independen* dan komprehensif dalam pemberitaannya, sehingga surat kabar tersebut menjadi salah satu surat kabar yang dipercaya oleh masyarakat Yogyakarta. Hal tersebut yang membuat keberadaan surat kabar *Kedaulatan Rakyat* menjadi penting di Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku:
- Abdurrahman Soerjomihardjo, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2002.
- _____, *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe; Sejarah Sosial 1880-1930*, Depok: Komunitas Bambu, 2008.
- Ahmat Adam, *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan*, Jakarta: Hasta Mitra, 2003.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press, 2008.
- Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2007.
- Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, Jakarta: Granit, 2004.

- Maters, Mirjam, *Dari Perintah Halus ke Tindakan Keras*, Jakarta: Hasta Mitra, 2003.
- Muhidin M. Dahlan, dkk, *Seabad Pers Kebangsaan; Bahasa Bangsa, Tanah Air Bahasa*, Jakarta: I:Boekoe, 2007.
- Nugroho Notosusanto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah*, Jakarta: Mega Book Store, 1984.
- Octo Lampito, *Setengah Hati Sekokoh Nurani*, Yogyakarta: PT BP Kedaulatan Rakyat, 2005.
- Oka Kusumayudha, *Amanat Sejarah dari Pekik Kemerdekaan Hingga Suara Hati Nurani Rakyat*, Yogyakarta: PT BP Kedaulatan Rakyat, 1996.
- Pramoedya Ananta Toer, *Sang Pemula*, Jakarta: Hasta Mitra, 1985.
- Siraishi, Takashi, *Zaman Bergerak*, Jakarta: Grafiti, 1997.
- Tanpa nama, *Garis Besar Perkembangan Pers Indoesia*, Jakarta: Serikat Penerbit Surat Kabar, 1971.
- Taufik Rahzen, dkk, *Tanah Air Bahasa; Seratus Jejak Pers Indoesia*, Jakarta: I:Boekoe, 2007.
- Tim Redaksi Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, 2008.
- Yukie H. Rushdie, *Setengah Abad Meniti Buih; Kedaulatan Rakyat Dalam Tajuk Rencana*, Yogyakarta: Yayasan Kubus Pustakatama Yogyakarta, 1995.
- Surat kabar:
Selebaran Siaran Kilat *Kedaulatan Rakyat*, "Semangat Rakjat Tak Dapat Dipatahkan", 25 Nopember 1945.
- Surat kabar *Kedaulatan Rakyat*, "Berat Dan Moelia Tiada Taranja", 10 Nopember 1945.
- _____, "Daerah Istimewa Jogjakarta Terhindar Dari Bahaja Vacuum Demokrasi Dan Hukum", 16 Djuli 1955.
- _____, "Dari Sinar Matahari Ke Kedaulatan Rakjat", 27 September 1965.
- Tugas akhir:
Edi Gunawan, *Djawa Sinbun Kai: Kehidupan Persurat Kabaran Di Jawa Pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945*, *Skripsi*,

12 Jurnal Prodi Ilmu Sejarah

Surakarta: UNS, 2004.

Mega Puspita Prinandani, Perkembangan Surat Kabar *Retnodhoemilah* Pada Masa Kepemimpinan Wahidin Soedirohoesodo (1901-1906), *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2015.

Widya Nurcahyani, Dari *Sinar Matahari* Menjadi *Kedaulatan Rakyat*: Surat Kabar Lokal Di Yogyakarta, *Skripsi*, Yogyakarta: UGM, 2010.

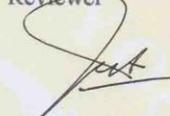
Yogyakarta, Juli 2018

Dosen Pembimbing TAS



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M. Ag
NIP. 19620321 198903 1 001

Reviewer



Danar Widiyanta, M. Hum
NIP. 19571209 198702 1 001

